



Collaborative Governance Dalam Pengembangan Berkelanjutan Desa Wisata Kamasan

Kadek Bagus Rama Iswara Milandika, I Putu Dharmanu Yudartha, I Dewa Ayu Putri Wirantari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: desoh03@gmail.com

Abstract

Collaborative governance is an approach that involves various stakeholders, such as government, community, and private sector, to work together to achieve common goals. Kamasan Tourism Village is one of the tourism villages whose development is carried out using a collaborative approach or collaboration with several parties (collaborative governance). Collaboration in Kamasan tourism village has certainly not run optimally due to several problems such as lack of communication between stakeholders, social change, and lack of utilization of digital developments. The purpose of this study is to determine the role of collaborative governance in the sustainable development of Kamasan Tourism Village. The research method used is a qualitative approach method. The results of the study indicate that effective collaboration among stakeholders has created an environment that supports sustainable development. However, this study also found several challenges that need to be addressed, such as increasing access to information and resources for local communities, as well as the need to strengthen decision-making and monitoring mechanisms. The recommendations provided aim to strengthen collaborative governance in supporting the sustainable development of Kamasan Tourism Village.

Keywords: *Collaborative Governance, Tourism Village Development, Sustainable Tourism, Kamasan Tourism Village*

ABSTRAK

Collaborative governance merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Desa Wisata Kamasan merupakan salah satu desa wisata yang pengembangannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kolaborasi atau kolaborasi dengan beberapa pihak (*collaborative governance*). Kolaborasi di desa wisata kamasan tentunya belum berjalan maksimal dikarenakan adanya beberapa masalah seperti kurangnya komunikasi antar *stakeholders*, perubahan sosial, dan kurangnya memanfaatkan perkembangan digital. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *collaborative governance* dalam pengembangan berkelanjutan Desa Wisata Kamasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif di antara pemangku kepentingan telah menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan berkelanjutan. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan akses informasi dan sumber daya bagi masyarakat lokal, serta perlunya penguatan mekanisme pengambilan keputusan dan monitoring. Rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk memperkuat *collaborative governance* dalam mendukung pengembangan berkelanjutan Desa Wisata Kamasan.

kata kunci: *collaborative governance, pengembangan desa wisata, wisata berkelanjutan, desa wisata kamasan*

I. Pendahuluan

Bali, sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia, telah lama dikenal dengan keindahan alamnya, kekayaan budaya, dan keramahan penduduknya. Pulau ini menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional. Namun, pesatnya perkembangan industri pariwisata juga membawa tantangan tersendiri, termasuk tekanan

terhadap lingkungan, budaya, dan sosial ekonomi masyarakat setempat (Sari, 2024). Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan pariwisata di Bali adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya serta lingkungan (Widari, 2020). Banyak destinasi wisata di Bali menghadapi masalah seperti over-tourism, degradasi lingkungan, dan hilangnya nilai-nilai budaya lokal (Gai, dkk., 2023). Di sisi lain, banyak desa wisata yang potensial belum sepenuhnya dimanfaatkan dan diintegrasikan ke dalam sistem pariwisata yang berkelanjutan (Kirana & Artisa, 2020).

Desa wisata merupakan salah satu solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Desa wisata menawarkan pengalaman yang otentik bagi wisatawan, dengan mengintegrasikan elemen budaya, alam, dan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal (Putri, dkk., 2024). Konsep ini tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan (Tjilen, dkk., 2023). Desa wisata memiliki potensi besar untuk menciptakan model pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Pengembangan desa wisata yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. *Collaborative governance*, atau tata kelola kolaboratif, adalah kerangka kerja yang memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau proyek-proyek pariwisata (Ardiyansah, dkk., 2023). Pemangku kepentingan ini meliputi pemerintah, komunitas lokal, sektor swasta, LSM, dan wisatawan itu sendiri.

Collaborative governance adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung Pemangku kepentingan “non-state” di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset (Ansell dan Gash, 2008). Edward DeSeve (Sudarmo, 2015) mendefinisikan *collaborative governance* adalah sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batasbatas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan definisi kesuksesan yang jelas. Selanjutnya Agrawal dan Lemos (Subarsono, 2011) mendefinisikan *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya “*multipartner governance*” yang meliputi sektor privat/ swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat “*hybrid*” seperti halnya kerja sama publik-privat-sosial. Sejalan dengan itu Balogh dkk (Subarsono, 2011) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan Perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak.

Fokus *collaborative governance* ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus diantara para pemangku kepentingan. *Collaborative governance* menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. Menurut O’Leary dan Bingham (Sudarmo, 2015) kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. Pendapat ini didukung oleh Bardach (Sudarmo, 2015) yang mendefinisikan collaboration sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerja sama ditujukan untuk meningkatkan “*public value*” ketimbang bekerja sendiri-sendiri.

Dalam pariwisata, *collaboration* antara dua institusi atau lebih yang bekerja sama ditujukan untuk meningkatkan ‘*public value*’ ketimbang bekerja sendiri-sendiri. Misalnya, ketika dua institusi kemukiman bekerja sama dalam mengembangkan pariwisata, maka akan dapat meningkatkan nilai publik yang dihasilkan oleh pariwisata tersebut. *Collaboration* dalam pariwisata dapat berupa berbagi informasi, sumber daya, dan teknologi antara institusi. Hal ini akan membantu menciptakan kesan yang lebih besar dari pariwisata yang dibangun. Selain itu, collaboration dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan pariwisata. Dengan *collaboration* yang efektif, pendapatan pajak dan pendapatan nasional dapat meningkat, serta memberikan dorongan bagi sektor-sektor lainnya secara ekonomi. Sebagai contoh, ketika dua institusi bekerja sama dalam mengembangkan pariwisata, maka akan dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam sektor pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata,

pemerintah dapat menggunakan kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan kolaborasi antara institusi. Misalnya, pemerintah dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan pariwisata dengan cara membantu institusi dalam mencapai kolaborasi yang efektif. Dengan kolaborasi yang efektif, sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mengembangkan ekonomi nasional dan lokal.

Pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar dan tercepat di dunia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pariwisata mampu menjadi pemasukan bagi negara, khususnya bagi pemerintahan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata sebagai instrumen kunci pada pertumbuhan global serta pengembangan dan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan dalam pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial yang perlu dikembangkan, hal ini sesuai pernyataan “Pariwisata bisa menjadi alat pengembangan yang potensial, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi, membantu mengurangi kemiskinan dan juga menciptakan hubungan timbal balik dengan produksi lainnya dan sektor penyedia jasa”. (Iain T. Christie and D. Elizabeth Crompton, 2003 : 63). Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki berbagai potensi wisata yang dapat digali serta dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan, rekreasi keluarga dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar lokasi wisata.

Perkembangan sektor pariwisata sekarang ini menunjukkan gerakan tren perjalanan wisatawan dari model wisata yang melibatkan jumlah banyak atau rombongan (*mass tourism*) ke wisata alternatif yang mengedepankan wisata alam, budaya, keunikan, atau karakteristik lokal yang ada di sebuah daerah (*alternative tourism*). Tujuan utamanya adalah untuk memperluas wawasan dan mencari pengalaman petualangan yang lebih mendalam, seperti wisata perdesaan. Berdasarkan kearifan lokal kultural masyarakatnya, desa memiliki daya tarik untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis komunitas yang menawarkan nilai keunikan budaya dan tradisi yang melekat pada masyarakat setempat. Salah satu pendekatan pengembangan pariwisata yang memberdayakan masyarakat melalui *Community Based Tourism* (CBT) dapat diwujudkan melalui pengembangan desa wisata. Ini dapat dilakukan dengan mengembangkan desa wisata yang menawarkan pengalaman wisata yang lebih mendalam, seperti wisata perdesaan. Dengan pendekatan CBT, masyarakat dapat memiliki peran aktif dalam pengembangan pariwisata, sehingga dapat membantu mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Pedoman Desa Wisata Edisi II, 2021).

Desa wisata atau dikenal juga dengan sebutan kampung, nagari, gampong, dan sebutan lainnya merupakan pengembangan suatu wilayah administratif desa yang mempunyai keunikan dan potensi sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW). Desa ini ditandai oleh kemampuannya untuk memberikan pengalaman unik terkait gaya hidup dan tradisi masyarakat di pedesaan, sekaligus menggambarkan potensi-potensi lainnya yang dimiliki (Perda Bali Nomor 5 Tahun 2020). Potensi ini dieksplorasi dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada di desa, yang berperan sebagai atribut dalam pengembangan produk wisata skala kecil. Dengan demikian, produk wisata tersebut dapat memenuhi segala kebutuhan selama perjalanan wisata, termasuk atraksi utama dan fasilitas pendukung yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pariwisata. Dengan pendekatan yang tepat, desa wisata dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mengembangkan ekonomi lokal dan nasional. Dengan pengembangan desa wisata yang efektif, pariwisata dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mengembangkan ekonomi lokal dan nasional.

Keberadaan desa wisata di Indonesia berkembang semakin pesat yang ditunjukkan pada data peserta Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 bahwa saat ini sudah terdapat 4.795 desa wisata yang tersebar di seluruh provinsi, dimana desa-desa wisata tersebut memiliki klasifikasi bervariasi mulai dari desa wisata rintisan hingga desa wisata mandiri (Putri, dkk., 2024).

Tabel 1. Jumlah Desa Wisata di Bali

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Wisata
1	Badung	17 Desa Wisata
2	Bangli	31 Desa Wisata
3	Karangasem	26 Desa Wisata
4	Buleleng	75 Desa Wisata
5	Denpasar	6 Desa Wisata
6	Tabanan	25 Desa Wisata
7	Klungkung	19 Desa Wisata
8	Jembrana	7 Desa Wisata
9	Gianyar	31 Desa Wisata

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2022

Kemudian, Berdasarkan data oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2022 disebutkan bahwa terdapat 238 desa wisata yang tersebar di seluruh wilayah Bali, diantaranya 17 desa wisata di Kabupaten Badung, 31 desa wisata di Kabupaten Bangli, 26 desa wisata di Kabupaten Karangasem, 75 desa wisata di Kabupaten Buleleng, 6 desa wisata di Kota Denpasar, 25 desa wisata di Kabupaten Tabanan, 19 desa wisata di Kabupaten Klungkung, 7 desa wisata di Kabupaten Jembrana, dan sebanyak 31 desa wisata di Kabupaten Gianyar. Berkembangnya sejumlah desa wisata dengan mengusung tema wisata alam, budaya lokal dan kerajinan diharapkan mampu meningkatkan mutu dari pariwisata yang ada di Bali tidak terkecuali pariwisata di Kabupaten Klungkung.

Kabupaten Klungkung adalah kabupaten terkecil di provinsi Bali, Indonesia. Ibu kotanya berada di Semarapura. Klungkung berbatasan dengan Kabupaten Bangli di sebelah utara, Kabupaten Karangasem di timur, Kabupaten Gianyar di barat dan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Desa Wisata Kamasan merupakan salah satu desa di kabupaten Klungkung yang memiliki nilai historis cikal bakal perkembangan seni lukis tradisional di Bali, kini dikembangkan menjadi desa wisata. Desa Wisata Kamasan merupakan salah satu dari 19 Desa yang ada di Kabupaten Klungkung, terletak di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Desa Kamasan memiliki berbagai potensi desa dan yang paling terkenal yaitu seni Lukis Kamasan, selain itu desa ini juga memiliki potensi dalam pengembangan seni ukiran, seperti seni ukir pada mas, perak, tembaga atau kuningan, serta peluru (selongsong peluru), yang tidak kalah menarik adalah kerajinan uang kepeng (pis bolong). Selain seni lukis, Desa Kamasan juga memiliki potensi pariwisata budaya. Wisatawan dapat mengunjungi galeri seni di desa ini, melihat proses pembuatan lukisan Kamasan secara langsung, atau mengikuti workshop untuk belajar seni lukis tradisional Bali. Desa ini juga sering menjadi tujuan wisata budaya bagi mereka yang ingin menyaksikan pertunjukan wayang atau tari tradisional Bali. Desa Kamasan juga dikenal sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang diakui oleh UNESCO sejak tahun 2017. Pengakuan ini menjadi bukti penting akan keunikan dan nilai seni lukis Kamasan yang perlu dilestarikan dan diapresiasi. Desa Kamasan merupakan salah satu contoh desa di Bali yang kaya akan warisan seni dan budaya, dan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata budaya serta penghasilan ekonomi bagi masyarakat desa.

Wisatawan mancanegara yang berlibur ke Bali sangat tertarik dan menyenangkan keindahan panorama alam dan objek wisata, kesenian, dan budaya yang dilestarikan masyarakat Pulau Dewata. Mereka terpesona oleh kesenian tradisional Bali, seperti tarian legong, kecak, dan barong yang memukau dengan gerakan yang anggun dan cerita yang mendalam. Selain itu, seni ukir kayu dan batu yang rumit serta pahatan yang indah memperkaya pengalaman seni mereka di Bali. Wisatawan juga terkesan oleh lukisan tradisional Bali yang sarat akan nilai budaya dan spiritual, mencerminkan kekayaan filosofi dan kepercayaan masyarakat Bali. Atas dasar itu pula Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengembangkan Desa Kamasan menjadi desa wisata dengan harapan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah itu.

Tabel 2. Kunjungan Desa Wisata Kamasan Tahun 2019-2024

No.	Tahun	Jumlah kunjungan	Periode Bulan	Keterangan
1	2019	312	Januari-Desember	Wisatawan Mancanegara
2	2020	-	Januari-Desember	Tidak adanya wisatawan yang datang dikarenakan wabah covid-19
3	2021	-	Januari-Desember	Tidak adanya wisatawan yang datang dikarenakan wabah covid-19)
4	2022	224	Januari-Desember	Wisatawan Mancanegara
5	2023	198	Januari-Desember	Wisatawan Mancanegara
6	2024	101	Januari-Maret	Wisatawan Mancanegara

Sumber: Pengelola Desa Wisata Kamasan 2024

Tabel diatas menunjukkan jumlah wisatawan yang datang ke Desa Kamasan pada rentang waktu 2019 hingga paruh pertama tahun 2024. Pada tahun 2019, terdapat 312 orang wisatawan yang mengunjungi Desa Wisata Kamasan. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, tidak ada wisatawan yang datang untuk berkunjung dikarenakan dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, setelah sedikit membaiknya situasi, terdapat 224 wisatawan yang mengunjungi Desa Kamasan. Jumlah di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 198 wisatawan. Pada tahun 2024, wisatawan yang berkunjung baru sejumlah 101 dari jarak bulan januari sampai maret di tahun 2024. Dari penjelasan tabel di atas, perubahan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun tidak terlepas dari beberapa faktor dan masalah yang mempengaruhi wisatawan atau pengunjung yang datang ke Desa Wisata Kamasan.

Pertama, Kesulitan koordinasi antar stakeholder merupakan masalah yang sering kali menghambat perkembangan seni di Desa Wisata Kamasan. Berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan seni, seperti pemerintah daerah, komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, dan pelaku industri seni, seringkali memiliki agenda, kepentingan, dan tujuan yang berbeda. Hal ini dapat menghasilkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan bersama dan mengoordinasikan upaya mereka untuk mengembangkan seni lokal dengan baik. Terkadang, kurangnya komunikasi dan kerjasama antar pihak dapat mengakibatkan tumpang tindihnya program-program dan proyek-proyek seni, pemborosan sumber daya, dan terhambatnya kemajuan secara keseluruhan. Selain itu, adanya perbedaan pendapat dan konflik internal antarpihak juga dapat menghambat proses koordinasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih aktif dan terkoordinasi dalam membangun hubungan yang kuat antar pihak, meningkatkan komunikasi dan kerjasama, serta menciptakan mekanisme koordinasi yang efektif untuk memastikan bahwa semua pihak dapat bekerja sama secara harmonis dalam mengembangkan seni di desa wisata.

Kedua, Masalah terkait perubahan sosial dan demografi memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan seni di desa wisata. Perubahan dalam pola migrasi, demografi, dan nilai budaya lokal dapat mengancam keberlanjutan seni tradisional dan warisan budaya di desa tersebut. Misalnya, ketika terjadi penurunan jumlah penduduk lokal karena migrasi ke perkotaan atau peningkatan jumlah penduduk tua, kemungkinan besar akan terjadi kekurangan tenaga kerja yang terampil dalam bidang seni. Selain itu, perubahan nilai budaya dan gaya hidup modern dapat menggeser minat masyarakat lokal, terutama generasi muda, dari seni tradisional menuju kegiatan yang lebih modern dan populer. Jika tidak ada upaya yang cukup untuk mempertahankan dan mentransfer pengetahuan serta keterampilan seni tradisional dari generasi tua ke generasi muda, seni di desa wisata dapat menghadapi risiko kepunahan. Oleh karena itu, penting bagi desa wisata untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi masalah-masalah terkait perubahan sosial dan demografi agar seni tradisional tetap berkembang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya mereka.

Ketiga, Kurangnya pemanfaatan platform media sosial oleh Desa Wisata Kamasan dapat menjadi kendala serius dalam mengembangkan dan memperkenalkan seni lokal mereka kepada audiens yang lebih luas. Dalam era digital yang terus berkembang, media sosial memberikan platform yang sangat potensial untuk mempromosikan seni dan budaya lokal secara efektif kepada wisatawan dan penggemar seni di seluruh dunia. Dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Tiktok, Desa Wisata

Kamasan dapat dengan mudah membagikan informasi tentang acara seni yang diadakan, menampilkan karya seni unik yang diproduksi oleh seniman lokal, dan berinteraksi langsung dengan audiens mereka. Melalui media sosial, desa ini memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan pasar mereka, menarik perhatian wisatawan potensial, dan memperkuat citra mereka sebagai tujuan wisata seni yang menarik. Selain itu, media sosial juga memungkinkan Desa Wisata Kamasan untuk membangun komunitas online yang aktif dan berinteraksi dengan penggemar seni dari berbagai belahan dunia, menciptakan hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan para pengunjung dan pelanggan potensial. Oleh karena itu, penting bagi Desa Wisata Kamasan untuk memanfaatkan potensi media sosial secara maksimal dalam upaya mereka untuk mengembangkan dan memperkenalkan seni lokal mereka kepada dunia.

Penggunaan teori *collaborative governance* dalam penelitian ini memiliki peran yang penting dalam pengembangan Desa Wisata Kamasan yang berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan dan pembangunan desa wisata, pendekatan kolaboratif ini mengedepankan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan akademisi. Melalui kerjasama yang erat dan dialog terbuka antara berbagai pemangku kepentingan, teori *collaborative governance* memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan partisipatif, sehingga memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan secara adil. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata, teori ini memungkinkan adanya pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan aspirasi lokal, sehingga proyek-proyek pembangunan dapat lebih sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan yang ada. Selain itu, kolaborasi antar berbagai pihak juga memungkinkan adanya pembagian tanggung jawab dan sumber daya yang lebih efisien, sehingga memperkuat kapasitas pengelolaan dan pemeliharaan desa wisata secara berkelanjutan. Dengan demikian, teori *collaborative governance* tidak hanya memfasilitasi pengembangan desa wisata yang inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan terciptanya hubungan saling percaya dan kerjasama yang berkesinambungan di antara semua pemangku kepentingan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan focus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Dalam tulisan lain menyatakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya.

Pemilihan pendekatan penelitian kualitatif dilakukan atas dasar spesifikasi subjek penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan mencakup realitas sosial. Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Metode penelitian deskriptif-kualitatif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen. Dipilihnya metode ini sebagai salah satu metode penulisan guna memperoleh gambaran di lapangan dan Peran Collaborative Governance dalam Pengembangan Berkelanjutan Desa Wisata Kamasan.

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang

biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Analisis data kualitatif merupakan proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010: 244).

III. Hasil dan Pembahasan

Hasil Temuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kamasan, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, Indonesia. Desa Kamasan memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata budaya. Wisatawan dapat mengunjungi galeri seni di desa ini, melihat langsung proses pembuatan lukisan Kamasan, atau mengikuti lokakarya untuk belajar seni lukis tradisional Bali. Desa ini juga menjadi tujuan wisata budaya yang populer bagi mereka yang ingin menyaksikan pertunjukan wayang atau tari tradisional Bali.

Penelitian ini menggunakan delapan indikator *Collaborative Governance* menurut Deseve dalam Sudarmo (2011:110-116), yaitu: *Networked Structure*, *Commitment to a Common Purpose*, *Trust Among the Participant*, *Governance*, *Access to Authority*, *Distributive Accountability/Responsibility*, *Information Sharing*, dan *Access to Resources*. Kedelapan indikator tersebut dianalisis dan dikaitkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Berdasarkan analisis ini, peneliti memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran *Collaborative Governance* dalam pengembangan berkelanjutan Desa Wisata Kamasan.

1. Networked Structure

Networked Structure mengacu pada hubungan antara elemen-elemen dalam suatu sistem yang bersama-sama mencerminkan aspek fisik dari jaringan yang diatur. Dalam pemerintahan kolaboratif, struktur jaringan ini menghindari pembentukan hierarki, sehingga tidak ada individu yang memiliki jabatan tertinggi. Semua pihak yang terlibat memiliki otoritas, tanggung jawab, hak, dan peluang yang sama dalam mengakses sumber daya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Desa Wisata Kamasan, kolaborasi dilakukan oleh Pemerintah Desa Kamasan, Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, UMKM di Desa Kamasan, serta masyarakat desa. Berdasarkan wawancara, meskipun setiap pihak memiliki peran berbeda, semua pihak bersama-sama berupaya untuk mencapai kesetaraan dan keseimbangan peran, tanpa adanya dominasi.

2. Commitment to a Common Purpose

Commitment to a Common Purpose menjelaskan alasan mengapa suatu jaringan harus ada, yaitu karena adanya perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan positif yang terartikulasi dari misi umum suatu organisasi atau lembaga. Kolaborasi di Desa Kamasan bertujuan mengoptimalkan potensi desa dan peran serta masyarakat untuk menunjang Desa Kamasan menuju Desa Wisata, yang merupakan salah satu misi dari Desa Kamasan.

3. Trust Among the Participants

Trust Among the Participants didasarkan pada hubungan profesional dan sosial di mana para pihak mempercayai informasi atau usaha-usaha dari *stakeholders* lain untuk mencapai tujuan bersama. Rasa saling percaya antar pihak (masyarakat, pemerintah, dan swasta) sangat penting dalam kolaborasi Desa Wisata Kamasan. Berdasarkan wawancara, rasa saling percaya yang terbangun terlihat dari tindakan yang dilakukan setiap *stakeholders*. Pemerintah desa dan Dinas Pariwisata berperan sebagai pendukung masyarakat dalam mengembangkan desa wisata, sementara POKDARWIS menjadi penyalur informasi untuk mengikutsertakan pelaku UMKM dalam pameran.

4. Governance

Governance merujuk pada bagaimana aturan kerjasama dilaksanakan, termasuk peraturan terkait pelaksanaan program dan kebebasan memutuskan bagaimana kerjasama dilaksanakan. *Governance* juga mencakup tentang *boundary* dan *exclusivity*, yaitu ketegasan tentang siapa saja pihak yang terlibat, batasan perilaku, serta kebebasan dalam menetapkan bagaimana kolaborasi akan dilaksanakan. Dalam pengembangan Desa Wisata Kamasan, tata kelola yang tercipta membangun partisipasi aktif baik dari masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Pemerintah Desa dan POKDARWIS memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berinovasi, sementara Dinas Pariwisata berperan sebagai fasilitator.

5. Access to Authority

Access to Authority menjelaskan tentang tersedianya standar-standar prosedur yang jelas dan diterima secara luas oleh para *stakeholders*. Dalam kolaborasi pengembangan Desa Wisata Kamasan, setiap *stakeholders* memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat. Pemerintah desa dan POKDARWIS memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Akses terhadap wewenang memungkinkan masyarakat dan *stakeholders* untuk berinovasi dan mengembangkan potensi mereka.

6. Distributive Accountability/Responsibility

Distributive Accountability/Responsibility mengacu pada pembagian tanggung jawab dan pengambilan keputusan di antara seluruh anggota jaringan. Dalam pengembangan Desa Wisata Kamasan, proses ini berjalan dengan baik sesuai dengan bidang masing-masing. Pemerintah Desa dan POKDARWIS memberikan arahan kepada UMKM untuk mengikuti pameran, sementara masyarakat terlibat aktif dalam mewujudkan rencana yang telah disusun. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menemukan solusi atas kekurangan yang ada. Dengan demikian, tanggung jawab dan pengambilan keputusan didistribusikan secara merata di antara para *stakeholders*.

7. Information Sharing

Information Sharing menekankan pada kemudahan akses informasi bagi para anggota, serta perlindungan privasi dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota. Dalam pengembangan Desa Wisata Kamasan, berbagi informasi dilakukan antara Pemerintah Desa dengan Dinas Pariwisata. Berdasarkan wawancara, upaya berbagi informasi berjalan cukup baik.

8. Access to Resources

Access to Resources mencakup ketersediaan sumber daya keuangan, teknis, manusia, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kolaborasi. Dalam kolaborasi pengembangan Desa Wisata Kamasan, sumber daya yang paling mendukung adalah seni kerajinan dan budaya yang dimiliki desa. Meskipun ada dukungan yang diberikan, tidak semua kebutuhan sumber daya terpenuhi. Dalam beberapa situasi, terutama saat mengikuti pameran, beberapa pengrajin seni harus bertindak secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya.

Pembahasan

Network Structure

Indikator *Network Structure* dalam Collaborative Governance untuk pengembangan Desa Wisata Kamasan menunjukkan bahwa jaringan kerja sama yang terjalin antara pemerintah desa, Dinas Pariwisata, Pokdarwis, dan masyarakat setempat telah dibangun dengan prinsip kesetaraan dan partisipasi. Meskipun setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, kolaborasi ini diatur sedemikian rupa agar tidak ada pihak yang mendominasi. Struktur jaringan yang terbentuk bersifat non-hierarkis, di mana semua pemangku kepentingan memiliki akses yang sama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan desa wisata.

Keseimbangan peran dan kesetaraan otoritas ini tercermin dalam berbagai kegiatan, seperti perencanaan, evaluasi, dan penataan lingkungan desa wisata, yang dilakukan melalui koordinasi bersama tanpa ada

monopoli kekuasaan. Hal ini memastikan bahwa pengembangan Desa Wisata Kamasan dilakukan secara inklusif dan kolektif, dengan setiap pihak saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pengembangan berkelanjutan desa wisata.

Commitment to a Common Purpose

Indikator *Commitment to a Common Purpose* dalam pengembangan Desa Wisata Kamasan menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Desa Kamasan, Bapak I Gede Buda Artawan, menekankan bahwa salah satu misi utama desa adalah mengoptimalkan potensi desa dan melibatkan masyarakat untuk mendukung desa menjadi desa wisata. Komitmen ini terlihat dari antusiasme masyarakat yang semakin aktif dalam mendukung program-program desa wisata, yang pada gilirannya juga memberikan dampak positif bagi promosi seni dan budaya lokal.

Komitmen ini juga didukung oleh Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Kamasan yang berperan aktif dalam setiap kegiatan pengembangan desa wisata. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Ibu Ni Made Sulistiawati, menegaskan bahwa visi, misi, dan tujuan pengembangan desa wisata telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat tantangan dalam kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Sikap masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh pelukis wayang kamasan, Bapak I Made Sondra, juga menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pengembangan desa wisata. Masyarakat tidak hanya aktif tetapi juga semakin banyak yang terlibat dalam kegiatan yang mendukung keberadaan desa wisata, yang pada akhirnya juga meningkatkan penghasilan mereka. Secara keseluruhan, komitmen terhadap tujuan bersama dalam pengembangan Desa Wisata Kamasan sangat kuat, dengan keterlibatan aktif dari pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat, meskipun ada beberapa tantangan dalam hal pengembangan SDM yang perlu diatasi.

Trust Among the Participant

Indikator *Trust Among the Participants* dalam pengembangan Desa Wisata Kamasan menunjukkan bahwa rasa saling percaya antara berbagai pihak yang terlibat, seperti masyarakat, pemerintah desa, dan Dinas Pariwisata, merupakan elemen penting dalam keberhasilan kolaborasi. Kepercayaan ini tercermin dari dukungan yang diberikan oleh pemerintah, baik melalui penyediaan fasilitas maupun partisipasi dalam berbagai event yang mendukung UMKM lokal.

Komunikasi yang baik dan tindakan nyata dari masing-masing stakeholders, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa dan Dinas Pariwisata, menjadi fondasi penting dalam membangun dan memperkuat kepercayaan di antara para peserta kolaborasi. Kepercayaan ini juga mendorong masyarakat, termasuk para seniman seperti I Made Sondra, untuk lebih aktif berpartisipasi dalam mengembangkan potensi desa wisata. Dengan kepercayaan yang terbangun, kolaborasi di Desa Wisata Kamasan dapat berjalan dengan lebih efektif, menghasilkan dampak positif yang dirasakan oleh seluruh komunitas, dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata lokal.

Governance

Indikator *Governance* dalam kolaborasi pengembangan Desa Wisata Kamasan menunjukkan bahwa tata kelola yang ada didasarkan pada partisipasi aktif dari masyarakat dan stakeholders lainnya, dengan aturan dan peran yang jelas namun fleksibel. Dari wawancara dengan Bapak I Gede Buda Artawan, selaku Kepala Desa dan Pembina Pokdarwis, terlihat bahwa masyarakat, terutama yang berlatar belakang sebagai pengrajin, diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi desa dengan caranya sendiri, seperti memanfaatkan teknologi informasi untuk mempromosikan kerajinan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa governance di tingkat desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinovasi dan berpartisipasi secara aktif.

Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ni Made Sulistiawati, mengambil peran sebagai fasilitator dalam kolaborasi ini. Mereka mendorong dan memfasilitasi desa-desa yang memiliki potensi untuk berkembang, terutama desa-desa yang telah menunjukkan keinginan dan upaya untuk maju. Pernyataan dari Bapak I Made Sondra, seorang penggiat seni, mendukung pandangan ini dengan menyatakan

bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata semakin meningkat dan semakin inovatif. Secara keseluruhan, governance dalam kolaborasi ini memperlihatkan adanya kebebasan bagi masyarakat untuk berkreasi dan inovasi, didukung oleh peran fasilitatif dari pemerintah. Tata kelola ini menegaskan bahwa semua pihak memiliki peran yang jelas namun tetap fleksibel dalam pelaksanaan program pengembangan desa wisata.

Access to Authority

Indikator *Access to Authority* dalam kolaborasi pengembangan Desa Wisata Kamasan menunjukkan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki wewenang yang sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat. Wewenang ini diberikan dengan tujuan untuk memungkinkan implementasi keputusan secara efektif dan mendorong inovasi. Berdasarkan wawancara, pemerintah desa memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkan kreativitas mereka, khususnya dalam bidang seni dan kerajinan. Ini mencakup berbagai inovasi seperti pengembangan seni ukir dari bahan kuningan menjadi selongsong peluru dan penggunaan media baru dalam seni lukis. Pemerintah desa memastikan bahwa kebebasan ini tidak berlebihan tetapi tetap dalam batas-batas yang disepakati.

Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, di sisi lain, berperan sebagai pembina, fasilitator, dan pendukung, memastikan bahwa setiap inovasi dan pengembangan tetap sesuai dengan ketentuan yang ada. Mereka memberikan dukungan yang diperlukan selama aktivitas-aktivitas ini tetap dalam kerangka peraturan yang berlaku. Dari sisi masyarakat, terdapat kebebasan yang diakui untuk mengembangkan seni, asalkan tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, kolaborasi ini didasarkan pada prosedur standar yang jelas dan diterima secara luas, yang memungkinkan adanya akses terhadap wewenang untuk berbagai pihak. Dengan adanya dukungan dari pemerintah desa dan Dinas Pariwisata, masyarakat dan pemangku kepentingan lain di Desa Wisata Kamasan dapat berinovasi dan mengembangkan potensi yang ada, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan berkelanjutan.

Distributive Accountability/ Responsibility

Indikator *Distributive Accountability/Responsibility* atau pembagian tanggung jawab dalam kolaborasi pengembangan Desa Wisata Kamasan menunjukkan adanya distribusi tanggung jawab yang jelas dan merata di antara para pemangku kepentingan. Setiap pihak, mulai dari pemerintah desa, Pokdarwis, hingga masyarakat dan pelaku usaha, memiliki peran spesifik yang saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan wawancara, Pemerintah Desa Kamasan dan Pokdarwis berperan dalam memberikan arahan kepada UMKM dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pameran-pameran. Setelah pameran, evaluasi bersama dilakukan untuk menilai dampaknya dan menemukan solusi atas kendala yang mungkin terjadi. Hal ini mencerminkan adanya proses evaluasi yang berkelanjutan dan pembelajaran untuk perbaikan di masa depan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, meskipun tidak terlibat langsung dalam perencanaan dan evaluasi, berperan dalam memberikan pembinaan kepada para pelaku industri kreatif di Desa Kamasan. Ini menunjukkan adanya pembagian peran yang sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dari sisi masyarakat, seperti yang diutarakan oleh seorang pengerajin seni lukis, tanggung jawab di antara para pelaku seni telah diatur melalui kesepakatan bersama. Setiap pengerajin memiliki peran spesifik dalam penataan dan pengelolaan karya seni mereka, yang memastikan bahwa setiap orang berkontribusi secara signifikan dalam proses pengembangan. Secara keseluruhan, *Distributive Accountability/Responsibility* di Desa Wisata Kamasan diterapkan dengan baik. Tanggung jawab dan pengambilan keputusan didistribusikan secara merata di antara para pemangku kepentingan, yang menciptakan koordinasi efektif dan memungkinkan tercapainya tujuan bersama dengan lebih baik.

Information Sharing

Indikator *Information Sharing* atau berbagi informasi dalam konteks pengembangan Desa Wisata Kamasan menunjukkan adanya dinamika yang beragam di antara para pemangku kepentingan. Berdasarkan wawancara, terdapat upaya yang cukup baik dari pihak Pemerintah Desa Kamasan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung dalam hal berbagi informasi terkait pengembangan desa wisata. Pemerintah Desa

Kamasan secara rutin memberikan informasi dan laporan kepada Dinas Pariwisata mengenai tindak lanjut arahan yang diberikan, serta perkembangan yang telah dicapai.

Dinas Pariwisata juga aktif dalam memberikan informasi kepada desa melalui kegiatan monitoring, pendataan, serta pelatihan yang melibatkan peserta dari desa. Namun, terdapat celah dalam pembagian informasi kepada masyarakat, khususnya para pelaku seni di Desa Kamasan. Salah satu pengrajin seni lukis, Bapak I Made Sondra, mengungkapkan bahwa dirinya tidak selalu mendapatkan informasi terkait acara atau pameran secara langsung dari pihak yang berwenang. Sebaliknya, informasi tersebut sering kali diperolehnya melalui upaya pribadi atau dari pelanggan yang berkunjung.

Kesimpulannya, meskipun ada upaya positif dari pihak pemerintah desa dan dinas pariwisata dalam berbagi informasi, masih ada tantangan dalam memastikan informasi tersebut tersampaikan secara merata kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan mekanisme dalam memberikan informasi agar semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pelaku seni, dapat menerima informasi yang relevan dan berpartisipasi secara optimal dalam pengembangan Desa Wisata Kamasan.

Access to Resources

Indikator *Access to Resources* atau akses terhadap sumber daya dalam kolaborasi pengembangan Desa Wisata Kamasan menunjukkan adanya dukungan yang sebagian besar terfokus pada pengembangan potensi seni dan budaya lokal. Berdasarkan wawancara, sumber daya utama yang mendukung pengembangan desa wisata Kamasan berasal dari seni kerajinan dan budaya, bukan dari sumber daya alam yang terbatas di desa ini. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Desa Kamasan, memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas seperti promosi melalui website dan penyediaan kendaraan. Namun, pendanaan langsung berasal dari dana desa, bukan dari alokasi khusus dari pemerintah kabupaten atau instansi terkait. Meskipun ada fasilitas yang disediakan, dukungan ini tidak selalu mencakup semua kebutuhan pengrajin lokal. Hal ini tercermin dari pengalaman I Made Sondra, seorang pengrajin seni lukis, yang seringkali harus berinisiatif secara mandiri dalam memanfaatkan peluang, seperti mengikuti pameran.

Keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya, terutama dalam dukungan untuk promosi dan partisipasi dalam kegiatan eksternal, menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal dukungan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi bagi pengrajin lokal. Kesimpulannya, meskipun ada upaya yang signifikan dari pihak pemerintah untuk menyediakan akses sumber daya, masih diperlukan langkah-langkah tambahan untuk memastikan semua pelaku seni dan budaya di Desa Wisata Kamasan dapat mengoptimalkan potensi mereka dengan dukungan yang memadai.

IV. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Collaborative Governance dalam Pengembangan Berkelanjutan Desa Wisata Kamasan berjalan cukup baik, akan tetapi masih belum optimal. Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari indikator *collaborative governance* yang diantaranya yaitu:

1. *Networked Structure* yang kuat antara para pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penerapan *collaborative governance* untuk pengembangan berkelanjutan Desa Wisata Kamasan. Keterkaitan dan koordinasi yang efektif antar aktor dalam jaringan ini memungkinkan terciptanya sinergi yang mendukung tujuan bersama dalam mempertahankan dan memajukan desa wisata secara berkelanjutan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen terhadap tujuan bersama (*Commitment to a Common Purpose*) di antara para pemangku kepentingan merupakan elemen kunci dalam implementasi *collaborative governance* untuk pengembangan berkelanjutan Desa Wisata Kamasan. Komitmen ini mendorong terciptanya kolaborasi yang solid dan berkelanjutan, di mana semua pihak bekerja sama untuk mencapai visi dan misi yang sama dalam memajukan desa wisata.

3. *Trust Among the Participants* memainkan peran penting dalam keberhasilan *collaborative governance* untuk pengembangan berkelanjutan Desa Wisata Kamasan. Kepercayaan yang kuat antar pemangku kepentingan memperkuat kerja sama dan koordinasi, sehingga menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendukung pencapaian tujuan bersama dalam memajukan desa wisata secara berkelanjutan.
4. Tata kelola (*governance*) yang efektif menjadi elemen penting dalam penerapan *collaborative governance* untuk pengembangan berkelanjutan Desa Wisata Kamasan. Tata kelola yang baik memastikan bahwa setiap proses kolaborasi berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, sehingga mendukung tercapainya tujuan bersama dalam mengembangkan desa wisata secara berkelanjutan.
5. *Access to Authority* merupakan faktor penting dalam keberhasilan *collaborative governance* untuk pengembangan berkelanjutan Desa Wisata Kamasan. Akses yang memadai memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan strategis, yang pada gilirannya memperkuat koordinasi dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi lokal dalam upaya memajukan desa wisata secara berkelanjutan.
6. *Distributive Accountability/Responsibility* di antara para pemangku kepentingan sangat berpengaruh dalam implementasi *collaborative governance* untuk pengembangan berkelanjutan Desa Wisata Kamasan. Pembagian akuntabilitas dan tanggung jawab yang jelas dan merata memastikan bahwa setiap pihak berkontribusi secara optimal dalam upaya kolaboratif, sehingga mendukung tercapainya tujuan bersama dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.
7. *Information Sharing* secara efektif di antara para pemangku kepentingan merupakan komponen krusial dalam penerapan *collaborative governance* untuk pengembangan berkelanjutan Desa Wisata Kamasan. Pertukaran informasi yang transparan dan terbuka memperkuat koordinasi antar aktor, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik, serta memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan dan strategi pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.
8. *Access to Resources* yang memadai menjadi faktor penting dalam keberhasilan *collaborative governance* untuk pengembangan berkelanjutan Desa Wisata Kamasan. Ketersediaan dan distribusi sumber daya yang adil memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berkontribusi secara efektif dalam proses kolaboratif, serta mendukung pelaksanaan program dan inisiatif yang dibutuhkan untuk memajukan desa wisata secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Berkelanjutan Desa Wisata Kamasan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah lebih aktif melibatkan partisipasi masyarakat, Partisipasi ini dapat diperkuat melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendekatan yang lebih inklusif, yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata.
2. Evaluasi keefektifan komunikasi antar pemangku kepentingan, mengeksplorasi bagaimana komunikasi yang lebih terstruktur dan sistematis dapat mendukung koordinasi yang lebih baik, serta bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih efisien dalam proses kolaborasi.
3. menganalisis lebih lanjut kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung di Desa Wisata Kamasan. Bagaimana kebijakan yang ada dapat diperkuat atau disesuaikan untuk lebih mendukung pengembangan berkelanjutan, serta bagaimana regulasi dapat dibuat lebih fleksibel namun tetap akuntabel untuk memastikan partisipasi yang berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan.

Daftar Pustaka

- Ahsani, R., Suryaningsih, O., Ma'rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa. *Ilmu Administrasi Publik*, 2, 135-146.
- Andari, N., Amalijah, E., & Jauhari, T. (2023). Tourism Governance in the Embodiment of Resilient and Sustainable Tourism Villages. *Plakat: Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat*, 5(1), 1-15.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Ardiansyah, F. W., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2023). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 741-756.
- Ariesmansyah, A. (2022). Collaborative governance in enforcement program for restrictions on community activities in Bandung City. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*, 11(2), 290-300.
- Astuti, R. S., Warsono, H., Rachim, A. (2020). Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. Semarang. Universitas Diponegoro Press.
- Astuti, Retno Sunu, Hardi Warsono, and Abd. Rachim. 2020. Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. ed. Tim DAP Press, Semarang Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro Press.
- Bawono, I. R. 2019. Optimalisasi potensi desa di Indonesia. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Creswell, J.W. (2010), *Research Design: Pendekatan Kualitatif dalam Perspektif*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Gai, A. M., Ibnu, S., Setijawan, A., & Paru, M. A. (2023). Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengembangan Wilayah Dan Kota. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*,
- Iain, C. T., & Elizabeth, C. D. (2003). Republik of Madagascar: Tourism Sektor Study Africa Region (No. 63). Working Paper Series.
- Islamy, L. O. S. (2018). Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta. Deepublish.
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 68-84.
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 7-12.
- Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Wisata
- Putri, J. A., Mistriani, N., Octafian, R., Setyaningtyas, M., Hibatullah, G. H., & Hidayah, K. (2024). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kearifan Lokal Terhadap Minat Berkunjung Di Desa Wisata Kandri Kota Semarang. *NAWASENA: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 3(1), 21-30.
- Putri, N. M. A. S., Purnamaningsih, P. E., & Supriliyani, N. W. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Business and Investment Review*, 2(1), 47-57.
- Sari, A. M. (2024). Pengaruh Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Kasus Bali. *Circle Archive*, 1(5), 1-13.
- Subarsono. A G. (2011). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sudarmo. (2015). Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance: Memuat Pengalaman Penelitian Lapangan Tentang Isu Pedagang Kaki Lima Dan Konflik Antar Kelompok. Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tjilen, A. P., Waas, R. F. Y., Ririhena, S. W., Tambaip, B., Syahrudin, S., Ohoiwutun, Y., & Prihandayani, R. D. (2023). Optimalisasi potensi desa wisata melalui manajemen pengelolaan yang berkelanjutan: Kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 2(6), 38-49.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Utami, A. D. M., Hariani, D., & Sulandari, S. (2021). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 10(3), 281-298.
- Waliah, S. dkk. (2022). Collaborative Governance (dalam Perpektif Administrasi Publik). Bandung. Media Sains Indonesia.
- Wanna, John. (2008). Collaborative Government: meanings, dimentions, drivers, and outcomes, dalam O'Flynn, Jannie & Wanna, John. Collaborative governance: a new era of public policy in Australia?. Australian National University E Press.
- Wanna. J. 2008. Collaborative government meanings, dimensions, drivers and coutcomes. Canberra: Australian National University E Press.
- Widari, D. A. D. S. (2020). Kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan: Kajian teoretis dan empiris. Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata, 1(1), 1-11.
- Wisata, P. D. (2021). Edisi II. Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi.
- Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(1), 1-23.
- Yusuf, A. Muri. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zaenuri, M., Musa, Y., & Iqbal, M. (2021). Collaboration governance in the development of natural based tourism destinations. Journal of Government and Civil Society, 5(1), 51-62.